

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN NGAWI**



TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 152 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4255);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 70 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 70);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);
47. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 72);
48. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 152);
49. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 152 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 152) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.A

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI NGAWI,


ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NGAWI NOMOR 152 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PADA KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Ngawi merupakan perubahan berdasarkan penyesuaian target dan pergeseran pagu anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusunlah perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah, didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah.

Perencanaan program kegiatan merupakan hal yang esensial bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kecamatan Ngawi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam rangka capaian program setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngawi kurun waktu 2021 -2026 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana

Kerja Perangkat Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
 40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
 46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan;
 47. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 72);
 48. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
 49. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 152 Tahun 2022);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai (tahun rencana) serta kondisi yang diinginkan selama 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi . Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah :

1. Penyelarasan Program dan kegiatan Kecamatan Ngawi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi SKPD dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawi Tahun 2021 dan perkiraan target Tahun 2022. Kinerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Ngawi.

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Ngawi untuk Belanja Langsung

sebesar Rp. 11.338.543.527 ,00 (termasuk perubahan) dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub.kegiatan Kinerja Kecamatan Ngawi Tahun 2022 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil prosentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Prosentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngawi adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Ngawi telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 tertera dalam lampiran tabel 2.1 pada halaman berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawi dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Ngawi s/d Tahun 2022
Kabupaten Ngawi

SKPD : KECAMATAN NGAWI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1	KECAMATAN												
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100		100 %			100 %			
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %		100 %					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	11 Dokumen	32 Dokumen	2.91
						Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	4 Dokumen	16 Dokumen	4.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	6 Laporan	22 Laporan	3.67
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	840 Kali	840 Kali	840 Kali	840 Kali	100	840 Kali	2520 Kali	3.00
						Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen	78 Dokumen	3.00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	1 Dokumen	31 Dokumen	31.00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	48 Kali	12 Kali	48 Kali	48 Kali	100	48 Kali	108 Kali	2.25
						Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Kali	7 Kali	3 Kali	3 Kali	100	2 Kali	12 Kali	6.00
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%				100%			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Olahraga yang dibeli/diadakan	80 Stel	90 Stel	72 Stel	72 Stel	100	80 Stel	242 Stel	3.025
						Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	80 Stel	89 Stel	75 Stel	75 Stel	100	80 Stel	244 Stel	3.05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Pakaian Batik yang dibeli			150 Meter	150 Meter							
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%		100%					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100% %	100 %	100 %	100 100% %	201 %	201.00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100% Unit	100 %	100 %	100 100% Unit	201 Unit	201.00		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan	2160 Kotak	730 Kotak	662 Kotak	662 Kotak	100 2160 Kotak	3552 Kotak	1.64
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah minuman yang disediakan	2160 Dus	22 Dus	662 Dus	662 Dus	100 2160 Dus	2844 Dus	1.32
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	21000 Lembar	6000 Lembar	11045 Lembar	11045 Lembar	100 21000 Lembar	38045 Lembar	1.81
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan	5000 Lembar	4000 Lembar	0 Lembar	0 Lembar	#DIV/0! 5000 Lembar	9000 Lembar	1.80
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti	36 Kali	99 Kali	25 Kali	25 Kali	100 36 Kali	160 Kali	4.44
					Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti								
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun							
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasiona/lapangan yang diadakan	4 Unit	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0 4 Unit	9 Unit	2.25
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	251 unit	100 unit	10 unit	10 unit	100 251 unit	361 unit	1.44
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	33 unit	33 unit	15 unit	15 unit	100 33 unit	81 unit	2.45
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	45 Unit	18 Unit	1 Unit	1 Unit	100 45 Unit	64 45	1.42
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%				100%		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	600 Surat	750 Surat	1500 Surat	1500 Surat	100 600 Surat	2850 Surat	4.75
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah rekening Air yang dibayar	60 Rekening	60 Rekening	60 Rekening	60 Rekening	100 60 Rekening	180 Rekening	3.00
						Jumlah rekening listrik yang dibayar	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	100 60 Kali	180 Kali	3.00
						Jumlah rekening Telepon yang dibayar	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	100 60 Kali	180 Kali	3.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	80 Jenis	25 Jenis	52 Jenis	52 Jenis	100 80 Jenis	157 Jenis	1.96
						Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	215 Buah	75 Buah	72 Buah	72 Buah	100 215 Buah	362 Buah	1.68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah pembayaran jasa Keamanan	150 Hari	0 Hari	0 Hari	0 Hari		150 Hari	150 Hari	1.00				
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan	150 Hari	220 Hari	60 Hari	60 Hari	100	150 Hari	430 Hari	2.87				
		Jumlah pembayaran jasa Operator	24 Hari	0 Hari	0 Hari	0 Hari		24 Hari	24 Hari	1.00				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	100	36 Kali	108 Kali	3.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%				100%			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	25 unit	25 unit	13 unit	13 unit	100	25 unit	63 unit	2.52
					Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	30 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	100	30 Kali	37 Kali	1.23	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	25 Kali	0 Kali	6 Kali	6 Kali	100	25 Kali	31 Kali	1.24
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi/Rutin Gedung kantor Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor Lainnya	0 Kali	52 Kali	0 Kali	0 Kali		0 Kali	52 Kali	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	62,50%				62,50%			
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah hasil koordinasi,Fasilitasi dan pengendalian tata kelola pemerintahan kecamatan								
7	01	02	2.02		Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	0	0	16 Kali	16 Kali	0		16 Kali	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	300 orang					300 orang	300 Orang	1.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah dokumentasi IKM desa yang disusun up to date	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	3.00
					Jumlah monev pelayanan kecamatan	12 Kali	12 Kali	9 Kali	9 Kali	100	12 Kali	33 Kali	2.75	
					Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan pelayanan desa	120 Orang	120 Orang	0 Orang	0 Orang	120	Orang	240 Orang	2.00	
					Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelayanan kecamatan	12 kali	16 Kali	16 Kali	0 Kali	12	kali	28 kali	2.33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peringatan hari besar Nasional yang difasilitasi	0	0	1 Kali	1 Kali	0		1 Kali	
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	0	0	16 Laporan	16 Laporan	0		33 Laporan	
7	01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	1 kali		240 kali	2.00
		Jumlah fasilitasi GSI	1 kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	1 kali		28 kali	-
		Jumlah fasilitasi RTLH	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Kali	5 Unit		10 Unit	-
		Jumlah fasilitasi bantuan korban bencana	24 Paket	24 Paket	0 Paket	0 Kali	24 Paket		48 Paket	2.00
		Jumlah Fasilitasi bantuan sosial masyarakat	24 Paket	24 Paket	0 Paket	0 Kali	24 Paket		16 Paket	2.00
		Jumlah fasilitasi Kampung KB	1 Kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali		2 Kali	40.00
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%			100%			-
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti							
7	01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 Kali	4 Kali	16 Laporan	16 Laporan	4 Kali	48 Kali	11.50
		Jumlah monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kali	12 Kali	16 Laporan	16 Laporan	12 Kali		48 Kali	0.83
		Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kali	12 Kali	16 Laporan	16 Laporan	12 Kali		40 Kali	0.83
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti							
7	01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	13 Kegiatan	1,623.75
		Jumlah laporan pembinaan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	0		46 Laporan	
7	01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Kesehatan Lingkungan	0 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	0 Unit	10 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Pengadaan dan pembangunan sarana pendidikan dan kebudayaan lingkungan	0 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit		0 Unit	10 Unit				
		Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	800 M2	850 M2	834 M2	834 M2		800 M2	2484 M2	8.59			
		Luasan Pavingisasi Kelurahan yang dibangun	1200 M2	2500 M2	2795 M2	2795 M2		1200 M2	6495 M2	-			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	12 Kegiatan	8.00	
						Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	0 Laporan	4 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	0 Laporan	25 Laporan	
						Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	800 M2	3250 M2	3128 M2	3128 M2	800 M2	7178 M2	0.00
						Luasan Pavingisasi Kelurahan yang dibangun	1200 M2	3200 M2	2470 M2	2470 M2	1200 M2	6870 M2	0.13
7	01	03	2.03		Koordinasi penerapan dan penegakan Perda da Perkada								
7	01	03	2.03	01	Koordinasi/senergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinyadibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Rakor tentang Ketertiban dan Keamanan wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	0 Kali	32 Kali	32 Kali		0 Kali	32 Kali	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase RW yang masuk zona hijau Covid 19	45%	0	0		45%	0.45	18,000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti hasil penyelenggaraan masyarakat kelurahan	45%				45%	0.45	133.33
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jenis Barang yang dicetak	160 Meter	0	0		160 Meter	160 Meter	0.28
						Jumlah Alat Tulis Kantor	100%	0	0		100%	1	45.00
						Jumlah Honor yang diterima	720 Kali	0	0		720 Kali	720 Kali	-
						Jumlah Makanan yang disediakan	8100 Kotak	0	0		8100 Kotak	8100 Kotak	-
						Jumlah pakaian Kerja Lapangan yang dibeli	60 Stel	0	0		60 Stel	60 Stel	-
						Persentase Kelurahan yang ditindaklanjuti hasil penyelenggaraan masyarakat kelurahan	45 %				45 %	45 %	0.27

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	45 %	5	6	7	8=(7/6)	9	45 %	10=(5+7+9)	11=(10/4)	-
7	01	04	2.01	1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan	Jumlah hasil koordinasi dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban	0	0	16	Laporan	16	Laporan	0			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	83,33%	0	0				83,33%			
						Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu	83,33%	0	0				83,33%			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun	12 Dokumen	0	0				12 Dokumen	12 Dokumen		0.08
						Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	76%	0	0							
						Jumlah laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang ditindaklanjuti	2 Laporan	0	0				2 Laporan	2 Laporan		6.00
						Jumlah laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindaklanjuti	12 Laporan	0	0				12 Laporan	12 Laporan		0.33
						Jumlah laporan keag pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti	12 Laporan	0	0				12 Laporan	12 Laporan		4.17
						Jumlah laporan hasil Musrenbangcam yang ditindaklanjuti	1 Laporan	0	0				1 Laporan	1 Laporan		12.00
						Jumlah desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	12 Desa	0	0				12 Desa	12 Desa		1.00
						Jumlah desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	12 Desa	0	0				12 Desa	12 Desa		0.33
						Jumlah laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti	4 Laporan	0	0				4 Laporan	4 Laporan		10.00
						Jumlah peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	50 Orang	0	0				50 Orang	50 Orang		0.80
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP pelayanan desa	12 Kali	0	0				12 Kali	12 Kali		0.17
						Jumlah monitoring evaluasi penyusunan SOP Pelayanan Desa	12 Kali	0	0				12 Kali	12 Kali		0.33
						Jumlah rapat koordinasi penyusunan SOP pelayanan desa	4 Kali	0	0				4 Kali	4 Kali		3.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah peserta sosialisasi tata pemerintahan desa	40 Orang	0	0				40 Orang	40 Orang		0.30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta sosialisasi pergantian perangkat desa	40 Orang	0	0		40 Orang	40 Orang	0.13	
		Jumlah rapat koordinasi penjangkaran perangkat desa	2 Kali	0	0		2 Kali	2 Kali	18.00	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi pergantian perangkat desa	4 Kali	0	0		4 Kali	4 Kali	9.00	
		Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan LPPDes	12 Kali	0	0		12 Kali	12 Kali	3.00	
		Jumlah rapat koordinasi penyusunan LPPDes	12 Kali	0	0		12 Kali	12 Kali	0.17	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi penyusunan LPPDes	5 Kali	0	0		5 Kali	5 Kali	2.40	
7	01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah rapat koordinasi terkait pelaksanaan Musdes	36 Kali	0	0	36 Kali	36 Kali	0.11	
		Jumlah monitoring pelaksanaan musdes	36 Kali	0	0		36 Kali	36 Kali	0.33	
		Jumlah fasilitasi Musdes	36 Kali	0	0		36 Kali	36 Kali	0.33	
		Jumlah rapat koordinasi terkait pelaksanaan Musrenbangcam	2 Kali	0	0		2 Kali	2 Kali	1.00	
		Jumlah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Musrenbangcam	12 Kali	0	0		12 Kali	12 Kali	1.00	
		Jumlah rapat koordinasi terkait fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	4 Kali	0	0		4 Kali	4 Kali	6.00	
		Jumlah asistensi penyusunan RKPDes dan DURKPDes	12 Kali	0	0		12 Kali	12 Kali	1.00	
		Jumlah tinjau lapangan lokasi DURKPDes	12 Kali	0	0		12 Kali	12 Kali	2.00	
		Jumlah rapat koordinasi terkait fasilitasi APBDes	2 Kali	0	0		2 Kali	2 Kali	1.00	
		Jumlah asistensi penyusunan APBDes	12 Kali	0	0		12 Kali	12 Kali	0.83	
		Jumlah verifikasi APBDes yang dilaksanakan	24 Kali	0	0		24 Kali	24 Kali	-	
7	01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Forkopimcam	12 Kali	0	0	12 Kali	12 Kali	-	
		Jumlah kegiatan trantib bersama Forkopimcam	24 Kali	0	0		24 Kali	24 Kali	-	
		Jumlah rapat koordinasi penjangkaran paskibraka	2 Kali	0	0		2 Kali	2 Kali	-	
		Jumlah pelatihan paskibraka	10 Kali	0	0		10 Kali	10 Kali	-	

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Untuk Tahun Anggaran berjalan yaitu Tahun 2022 dengan besar anggaran sebesar Rp. 8.662.275.922,00 terdiri dari 4 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi adalah :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran : Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Jenis Pelayanan:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan.

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya. Indikator kinerja utama Kecamatan Ngawi adalah :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
2. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN.

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 80,05. Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Ngawi dengan tingkat kepuasan pelayanan administrasi kategori memuaskan (nilai IKM \geq 80) dibagi jumlah desa di Kecamatan Ngawi. Untuk tahun 2023 ditetapkan target sebesar 80,55 atau 16 dari 12 desa 4 Kelurahan di Kecamatan Ngawi dengan tingkat kepuasan pelayanan administrasi kategori memuaskan (memperoleh nilai IKM \geq 80,00).

Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Ngawi selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Ngawi.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survey IKM di Kantor Kecamatan Ngawi. Untuk tahun 2023 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 80,55. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngawi dapat dilihat pada Lampiran tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			81,25	81,50	81,75	82,00	81,25	81,50	81,75	82,00	
2	Presentase Desa/ Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN			83,33%	87,50%	-	-	83,33%	-	-	-	
3	Presentase Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Nilai > 80			50,00	-	81,12	85,12	50,00	-	81,12	85,12	
4	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			78,32	80,50	80,55	80,60	78,32	80,50	80,55	80,60	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Ngawi tahun 2021 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN sebesar 75.00% atau terdapat 16 desa dengan nilai IKM desa di atas 78.12

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 78.12

Untuk menilai tingkat capaiannya maka perlu melihat besarnya target yang telah ditetapkan. Untuk target Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN adalah 75.00% atau 12 desa dengan nilai IKM diatas 78.12, sedangkan target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan adalah 78.12.

Melihat capaian kinerja diatas maka kinerja Kecamatan Ngawi adalah baik.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan serta dampak yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngawi dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes

3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

Kecamatan Ngawi dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah hutan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah. Dalam masa pandemi Covid-19 ini juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Penerapan PPKM dan WFH sangat mempengaruhi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngawi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya berakibat juga pada tingkat pencapaian terhadap visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional.

2.3.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan

pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Ngawi demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu dari sisi perangkat daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan Ngawi apalagi di masa pandemi Covid-19 ini diperlukan terobosan atau inovasi baru dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngawi, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa
3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa
4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman

- kewenangan pembangunan didesa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
 9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
 10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum
 11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
 12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa
 13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
 14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
 15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berbedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan hasil Analisis kebutuhan Kecamatan Ngawi Tahun 2023. Hasil Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

SKPD : Kecamatan Ngawi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	7,934,376,925	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	9,337,808,496	
	<u>Kegiatan :</u> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 % 100 %	6,000,000	<u>Kegiatan :</u> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 % 100 %	72,500,000	
	Sub Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	9 Dokumen	1,000,000	Sub Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	25,000,000	
	Sub Kegiatan : 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Sub Kegiatan : 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	
	Sub Kegiatan : 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Sub Kegiatan : 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,500,000	
	Sub Kegiatan : 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,000,000	Sub Kegiatan : 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,500,000	
	Sub Kegiatan : 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,000,000	Sub Kegiatan : 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000	
	Sub Kegiatan : 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,000,000	Sub Kegiatan : 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	25,000,000	
	<u>Kegiatan :</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	%	7,381,174,377	<u>Kegiatan :</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	%	7,498,636,217	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen 1768 Orang/Bulan	7,377,174,377	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen 1768 Orang/Bulan	7,448,636,217	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	2,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	25,000,000
<u>Kegiatan :</u> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %		<u>Kegiatan :</u> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	145,000,000
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	145,000,000
<u>Kegiatan :</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	41,512,000	<u>Kegiatan :</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	453,172,279
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	125,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	165,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58,172,279
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,512,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	25,000,000
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	15,000,000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	25,000,000
<u>Kegiatan :</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	33,892,000	<u>Kegiatan :</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	750,000,000
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	4,916,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	300,000,000
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10,000,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	250,000,000

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	18,976,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	200,000,000
<u>Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100 %	421,019,548	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100 %	338,500,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65 Laporan	1,200,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65 Laporan	8,500,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	264 Laporan	251,552,548	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	264 Laporan	90,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Laporan	118,412,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Laporan	165,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	49,855,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	75,000,000
<u>Kegiatan :</u> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	50,779,000	<u>Kegiatan :</u> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	80,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	32,300,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	35,000,000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	18,479,000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	45,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ngawi	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	100.00 %	105,695,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ngawi	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	100.00 %	328,185,216
<u>Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Ngawi	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	87 %	50,000,000	<u>Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Ngawi	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	87 %	168,185,216
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah dokumen IKM Desa yang disusun up to date	1 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah dokumen IKM Desa yang disusun up to date	1 Dokumen	168,185,216
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	

<u>Kegiatan :</u> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngawi	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	16 Laporan	55,695,000	<u>Kegiatan :</u> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngawi	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	16 Laporan	160,000,000
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	55,695,000			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	160,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ngawi	Prosentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	2,029,206,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ngawi	Prosentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	3,889,931,800
<u>Kegiatan :</u> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngawi	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	60,810,000	<u>Kegiatan :</u> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngawi	Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	66,000,000
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	60,810,000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	66,000,000
<u>Kegiatan :</u> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Ngawi	Persentase Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan yang disusun tepat waktu	100 %	1,968,396,000	<u>Kegiatan :</u> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Ngawi	Persentase Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan yang disusun tepat waktu	100 %	3,823,931,800
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah laporan Pembinaan Masyarakat yang ditindak lanjuti	0 Laporan	365,996,000	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah laporan Pembinaan Masyarakat yang ditindak lanjuti	0 Laporan	373,931,800
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	
		Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	0 Orang				Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	0 Orang	
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Paket	1,252,000,000	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Paket	1,200,000,000
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	16 Kali	350,400,000	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	16 Kali	2,250,000,000
		Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjuti	16 Laporan				Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjuti	16 Laporan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas/Prmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas/Prmas	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngawi	Persentase Kelurahan yang masuk zona hijau covid	45 %	62,995,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngawi	Persentase Kelurahan yang masuk zona hijau covid	45 %	85,000,000

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngawi	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti hasil penyelenggaraan masyarakat kelurahan	100 %	62,995,000	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngawi	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti hasil penyelenggaraan masyarakat kelurahan	100 %	85,000,000
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	62,995,000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	85,000,000
		Jumlah makanan yang disediakan	70 Kotak				Jumlah makanan yang disediakan	70 Kotak	
		Jumlah Obat2 an yang disediakan	100 Botol				Jumlah Obat2 an yang disediakan	100 Botol	
		Jumlah Sembako yang disediakan	1,280 Kg				Jumlah Sembako yang disediakan	1,280 Kg	
		Jumlah barang yang dicetak	160 Meter				Jumlah barang yang dicetak	160 Meter	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ngawi	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu	100 % 100 %	297,245,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ngawi	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu	100 % 100 %	215,000,000
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngawi	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	100 %	297,245,000	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngawi	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	100 %	215,000,000
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	100 %				Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	100 %	
		Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun	100 %				Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun	100 %	
		Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti	100 %				Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti	100 %	
		Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti	100 %				Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti	100 %	
		Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti	100 %	
		Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti	100 %				Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti	100 %	
		Persentase laporan keg pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase laporan keg pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti	100 %	
		Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	100 %				Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	100 %	
		Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	80 %				Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	80 %	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	80,000,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	48,000,000
		Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	12 Laporan				Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	12 Laporan	

Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	64,965,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	56,000,000
	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan			Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	85,308,500	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	58,000,000
	Jumlah Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Laporan			Jumlah Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Laporan	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	72,280,000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	53,000,000
	Jumlah koordinasi Forkompimcam	4 Laporan			Jumlah koordinasi Forkompimcam	4 Laporan	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	
	TOTAL		10,429,517,925				13,855,925,512

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Ngawi. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1(satu) tahun berjalan disusun sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Ngawi agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Ngawi dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada

tabel 2.5 pada halaman berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

SKPD : Kecamatan Ngawi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dan. Gunung Kendil Rt. 001 Rw. 004, Kab. Ngawi			
2	Hibah Bidang Kebudayaan Bantuan Gamelan	Dan. Banyuurip Rt. 003 Rw. 002, Kab. Ngawi			
3	Pelatihan Make Up Artist (MUA)	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
4	Bantuan PJU	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
5	Bantuan Rehab Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
6	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	Ds. Banyuurip, Kab. Ngawi			
7	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Jl. Branjangan, Kab. Ngawi			
8		Jl. Sunan Kalijogo, Kab. Ngawi			
9	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Jl. Baiturrahman, Kab. Ngawi			
10	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	Dusun Brangol, Kab. Ngawi			
11	Pembangunan Rabat jalan usaha tani	Dusun Pojok, Kab. Ngawi			
12	Pembangunan Kantor/Balai Desa	Dusun Ngronggi, Kab. Ngawi			
13	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	jalan puntodewo Dusun Pandansari Utara RT. 001 RW. 006, Kab. Ngawi			
14	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	perumahan loka wiyata RT. 002 RW. 010 Dusun Padas, Kab. Ngawi			
15	Pembangunan Sumur dalam Sumber Tenaga Listrik PLN	Blok Gendom Dusun Pandansari Desa Jururejo, Kab. Ngawi			
16	Rehab sedang berat gedung PAUD	Dusun Mardiasri RT. 001 RW. 012 Desa Jururejo, Kab. Ngawi			
17	Bantuan sarana dan prasarana Posyandu (Tripod, sarung timbang, celana timbang, dacin, register SIP)	Jl. Siliwangi No. 90 RT. 003 RW. 001 Dusun Jrubong Utara, Kab. Ngawi			
18	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	Jl. Siliwangi No. 90 RT. 003 RW. 001 Dusun Jrubong Utara, Kab. Ngawi			
19	Bantuan Alat Dryer Gabah	Jl. Siliwangi No. 90 RT. 003 RW. 001 Dusun Jrubong Utara, Kab. Ngawi			
20	Pembangunan Sumur dalam Sumber Tenaga Listrik PLN	Dusun Sidomulyo RT 03 RW 06, Kab. Ngawi			
21	Jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani	Dusun Sidomulyo RT 03 RW 06, Kab. Ngawi			
22	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	Dusun Kandangan 1, RT 02 RW 02, Kab. Ngawi			
23	Pembangunan TPS 3R (Reused, Reduce, Recycle)	Dusun Kandangan 1 RT 03 RW 02, Kab. Ngawi			
24	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Kandangan 1 RT 02 RW 02, Kab. Ngawi			
25	Pelatihan Salon	Desa Karangasri, Kab. Ngawi			
26	Pelatihan Aneka Olahan Kue	Desa Karangasri, Kab. Ngawi			
27	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	Dusun Dungus, Kab. Ngawi			
28	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Dungus - Soko, Kab. Ngawi			
29	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Dungus - Nglarangan, Kab. Ngawi			
30	Pelatihan Handycraft Kain	Desa Karangasri, Kab. Ngawi			
31	Pembangunan Sumur dalam Sumber Tenaga Listrik PLN	dusun Prandon rt 02 /02 Desa karangtengah prandon, Kab. Ngawi			
32	Pembangunan Sumur dalam Sumber Tenaga Vertikal Turbin	Dusun Cabean Rt 01/01 Desa Karangtengah prandon, Kab. Ngawi			
33	Pembangunan talud jalan usaha tani	dusun ngandong rt 04/11, Kab. Ngawi			
34	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Bulung Desa Kartoharjo s/d Desa Karangasri, Kab. Ngawi			
35	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Ketanggi Lor RT.01 RW.02 Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
36	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Bulung RT.01 RW.07 Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
37	Pelatihan Aneka Olahan Toga	Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
38	Pelatihan Kerajinan Pelepeh Pisang	Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
39	Pelatihan Aneka Olahan Keripik	Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi			
40	Bantuan PJU	Desa Kerek, Kab. Ngawi			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
41	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	Desa kerek, Kab. Ngawi			
42	Bantuan hand tractor	Desa Kerek, Kab. Ngawi			
43	Sarana Produksi untuk Pekarangan Pangan Lestari/KRPL (Budidaya tanaman, budidaya ikan dan budidaya ternak)	Desa Kerek, Kab. Ngawi			
44	Bantuan sarana dan prasarana Poayandu (Tripod, sarung timbang, celana timbang, dacin, register SIP)	Desa Kerek, Kab. Ngawi			
45	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	lingkungan cabean kidul kampung baru ketanggi kabupaten ngawi, Kab. Ngawi			
46	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	jalan patinus kelurahan ketanggi kabupaten ngawi, Kab. Ngawi			
47	Pembangunan Bank Sampah	lingkungan sidomulyo rt24 rw06 kel ketanggi kabupaten ngawi, Kab. Ngawi			
48	Pelatihan Aneka Olahsan Makanan	kelurahan ketanggi kabupaten ngawi, Kab. Ngawi			
49	Sarana Produksi untuk Pertanian Keluarga (budidaya tanaman, budidaya ikan, budidaya ternak)	Dusun Pendem, Dusun Waruk, Dusun Depok, Dusun Munggur, Dusun Nguwin, Dusun Krawut, Kab. Ngawi			
50	Bantuan alsintan panen dan pasca panen tanaman pangan	Dusun Pendem, Dusun Waruk, Dusun Depok, Dusun Munggur, Dusun Nguwin, Dusun Krawut, Kab. Ngawi			
51	Rehabilitasi/renovasi Pustu	Dusun Munggur, Kab. Ngawi			
52	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	Jl. PB Sudirman Gang Dahlia 3 RT 005 RW 002, Kab. Ngawi			
53	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	Jl. Bratang Lingkungan Bugisan RT 010 RW 002, Kab. Ngawi			
54	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	Jl. Trunojoyo Gang Menur Lingkungan Kranggan RT 003 RW 003, Kab. Ngawi			
55	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Margomulyo, Kab. Ngawi			
56	Pelatihan Batik	Kelurahan Margomulyo, Kab. Ngawi			
57	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	Dsn. Banjar RT 01 RW 05, Kab. Ngawi			
58	Pembangunan TPS 3R (Reused, Reduce, Recycle)	Dsn. Ngantru RT 02 RW 07, Kab. Ngawi			
59	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dsn. Ngantru - Dsn. Blandongan, Kab. Ngawi			
60	Pelatihan pembuatan pakan ternak	Dsn. Ngawi, Kab. Ngawi			
61	Sarana Produksi untuk Pertanian Keluarga (budidaya tanaman, budidaya ikan, budidaya ternak)	Dsn. Banjar, Ngantru, Blandongan, Ngawi, Jetis, Kab. Ngawi			
62	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	RT 03 RW 01 Gang Makam, Kab. Ngawi			
63	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	RT 01 RW 01 Jalan Makam Selatan, Kab. Ngawi			
64	Pelatihan Peningkatan SDM Usaha Mikro	Kelurahan Pelem Jl. Munginsidi No.29, Kab. Ngawi			
65	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	Jl. Ronggolawe RT 08 RW 02, Kab. Ngawi			
66	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan/Perumahan	RT 03 RW 01 Gang Makam, Kab. Ngawi			
67	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	dusun bogoharjo, Kab. Ngawi			
68	Pembangunan Paving Jalan Poros Desa	dusun ngrambang, Kab. Ngawi			
69	Pembangunan Sumur dalam Sumber Tenaga Listrik PLN	desa watualang, Kab. Ngawi			
70	Bantuan kursi roda bagi warga miskin	desa watualang, Kab. Ngawi			
71	Pelatihan Las	desa watualang, Kab. Ngawi			
72	Pelatihan Sablon	desa watualang, Kab. Ngawi			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Ngawi.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Kecamatan Ngawi merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Kabupaten Ngawi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngawi

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Ngawi dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Ngawi. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Ngawi sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan program selama waktu 1 (satu) tahun dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Tahun 2023 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ngawi yang efisien dan efektif.

Tujuan strategis Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten. Tujuan Renja Perangkat

Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran strategis Renja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten. Sasaran strategis Renja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Kerja disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Ngawi mengampu Misi ke- 3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI."

Misi 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngawi selama 1 tahun ke depan antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngawi secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngawi dalam Renja Tahun 2021 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, Tempat Berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi

dan revisi standar.

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ngawi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2023, Kecamatan Ngawi mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Ngawi.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan
Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngawi Tahun 2023 adalah 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngawi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Ngawi, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Ngawi dan juga Kantor Kecamatan Ngawi sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di Wilayah Kabupaten Ngawi.
3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.824.287.300 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus ujuDua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi .Jumlah anggaran Renja Awal dan Anggaran Renja Perubahan.

Rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja 2023 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngawi mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngawi bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngawi adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kecamatan Ngawi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula (Renja 2023)	Menjadi (Perubahan Renja 2023)	RKPD 2023	Renja 2023	RKPD 2023 Perubahan							
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN																
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	%	%	100%	100%	10,429,517,925	7,915,247,110	7,915,247,110						100%	13,855,925,512	9,337,808,496
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	%	100%	100%	6,000,000	6,000,000	6,000,000						100%	72,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	9 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	9 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen	6,500,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Dokumen	6,500,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	7 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	7 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	%	100%	100%	7,381,174,377	6,500,736,138	6,500,736,138						100%	7,498,636,217	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun			26 Dokume 1768 Orang/bulan	26 Dokumen 1768 Orang/bulan	7,377,174,377	6,496,736,138	6,496,736,138	Kab. Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	26 Dokume 1768 Orang/bulan	7,488,636,217	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan			50 Laporan	50 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	50 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	%	%	100%	100%	0	0	0						100%	145,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4 Paket	4 Paket	0	0	0	Kab. Ngawi, Karangasri			Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Paket	145,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	%	%	100%	100%	41,512,000	56,679,000	56,679,000						100%	453,172,279	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,993,000	5,993,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Paket	55,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	10,000,000	17,660,000	17,660,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Paket	125,000,000	KECAMATAN NGAWI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Paket	165,000,000	KECAMATAN NGAWI

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	5,000,000	4,414,000	4,414,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Paket	58,172,279	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	1,512,000	1,512,000	1,512,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5 Laporan	5 Laporan	15,000,000	20,100,000	20,100,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	5 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	%				100%	100%	33,892,000	5,177,000	5,177,000							100%	750,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					8 Unit	8 Unit	4,916,000	2,677,000	2,677,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	8 Unit	300,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	10,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Unit	250,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					7 Unit	7 Unit	18,976,000	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	7 Unit	200,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	%				100%	100%	421,019,548	165,593,172	165,593,172							100%	338,500,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					65 Laporan	65 Laporan	1,200,000	10,800,000	10,800,000		PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	65 Laporan	8,500,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					264 Laporan	264 Laporan	251,522,548	41,526,172	41,526,172	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	264 Laporan	90,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					108 Laporan	108 Laporan	118,412,000	63,412,000	63,412,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	108 Laporan	165,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					48 Laporan	48 Laporan	49,855,000	49,855,000	49,855,000		PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	48 Laporan	75,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	%				100%	100%	50,779,000	50,779,000	50,779,000							100%	80,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					37 Unit	37 Unit	32,300,000	32,300,000	32,300,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	37 Unit	35,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21 Unit	21 Unit	18,479,000	18,479,000	18,479,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	21 Unit	45,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	%				100%	100%	105,695,000	58,950,000	58,950,000							100%	328,185,216	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	%				87%	87%	50,000,000	17,500,000	17,500,000							87%	168,185,216	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM Desa yang disusun up to date Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Dokumen 5 Laporan	1 Dokumen 5 Laporan	50,000,000	17,500,000	17,500,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen 5 Laporan	168,185,216	KECAMATAN NGAWI	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%				100%	100%	55,695,000	41,450,000	41,450,000							100%	160,000,000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					8 Laporan	8 Laporan	55,695,000	41,450,000	41,450,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	8 Laporan	160,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%				100%	100%	2,029,206,000	836,415,800	836,415,800							100%	3,889,931,800	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan	%				100%	100%	60,810,000	16,510,000	16,510,000							100%	66,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan	60,810,000	16,510,000	16,510,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Laporan	66,000,000	KECAMATAN NGAWI	

7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan yang disusun tepat	%			100%	100%	1,968,396,000	819,905,800	819,905,800				100%	3,823,931,800						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan Pembinaan Masyarakat yang ditindak lanjut Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%				0 Laporan 7 Lembaga 0 Orang	0 Laporan 7 Lembaga 0 Orang	365,996,000	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangtengah	0 Laporan 7 Lembaga 0 Orang	373,931,800	KECAMATAN NGAWI	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	%					24 Paket	24 Paket	1,252,000,000	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangtengah	24 Paket	1,200,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjut Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%				16 Kali 16 Laporan 32 Pokmas / Ormas	16 Kali 16 Laporan 32 Pokmas / Ormas	350,400,000	819,905,800	819,905,800	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangtengah	16 Kali 16 Laporan 32 Pokmas / Ormas	2,250,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kelurahan yang masuk ke	%			45%	45%	62,995,000	12,755,000	12,755,000							45%	85,000,000		
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti hasil penyelenggaraan masyarakat	%			100%	100%	62,995,000	12,755,000	12,755,000							100%	85,000,000		
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah makanan yang disediakan Jumlah Obat2 an yang disediakan Jumlah Sembako yang disediakan Jumlah barang yang dicetak	%				16 Laporan 70 Kotak 100 Botol 1280 Kg 160 Meter	16 Laporan 70 Kotak 100 Botol 1280 Kg 160 Meter	62,995,000	12,755,000	12,755,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	16 Laporan 70 Kotak 100 Botol 1280 Kg 160 Meter	85,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu	%			100%	100%	297,245,000	219,162,000	219,162,000							100%	215,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPD Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjut Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti Persentase laporan keg pelaksanaan Mudes yang ditindaklanjuti	%			100%	100%	297,245,000	219,162,000	219,162,000							100%	215,000,000		
#	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	%				1 Dokumen 12 Laporan	1 Dokumen 12 Laporan	80,000,000	43,050,000	43,050,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	48,000,000	KECAMATAN NGAWI	
#	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	%				2 Dokumen 12 Laporan	2 Dokumen 12 Laporan	64,965,000	105,515,000	105,515,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Dokumen 12 Laporan	56,000,000	KECAMATAN NGAWI	

#	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen 12 Laporan	4 Dokumen 12 Laporan	80,000,000	59,850,000	59,850,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Dokumen 12 Laporan	58,000,000	KECAMATAN NGAWI
#	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi Forkopimcam Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen 4 laporan 12 Laporan	1 Dokumen 4 laporan 12 Laporan	72,280,000	10,747,000	10,747,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen 4 laporan 12 Laporan	53,000,000	KECAMATAN NGAWI

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ngawi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2023 Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat

menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGAWI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kecamatan Ngawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula (Renja 2023)	Menjadi (Perubahan Renja 2023)	RKPD 2023	Renja 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana					Nasional	Daerah		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	KECAMATAN							10,429,517,925	7,915,247,110	7,915,247,110								13,855,925,512		
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	%	%	100%	100%	7,934,376,925	6,787,964,310	6,787,964,310					100%			9,337,808,496		
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	Dokumen % 100% 100%	Dokumen % 100% 100%	6,000,000	6,000,000	6,000,000					9 Dokumen 100% 100%			72,500,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	9 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen	6,500,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Dokumen	6,500,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan	7 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	7 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	%	100%	100%	7,381,174,377	6,500,736,138	6,500,736,138					100%	7,498,636,217	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Dokumen 1768 Orang/bulan	26 Dokumen 1768 Orang/bulan	7,377,174,377	6,496,736,138	6,496,736,138	Kab. Ngawi, Ngawi, Ngawi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	26 Dokumen 1768 Orang/bulan	7,488,636,217	KECAMATAN NGAWI

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					50 Laporan	50 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	50 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	%		%		100%	100%	0	0	0							100%	145,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					4 Paket	4 Paket	0	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri			Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Paket	145,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	%		%		100%	100%	41,512,000	56,679,000	56,679,000							100%	453,172,279	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,993,000	5,993,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Paket	55,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	10,000,000	17,660,000	17,660,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Paket	125,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Paket	165,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	5,000,000	4,414,000	4,414,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	2 Paket	58,172,279	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	1,512,000	1,512,000	1,512,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5 Laporan	5 Laporan	15,000,000	20,100,000	20,100,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	5 Laporan	25,000,000	KECAMATAN NGAWI	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	%		%		100%	100%	33,892,000	5,177,000	5,177,000							100%	750,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					8 Unit	8 Unit	4,916,000	2,677,000	2,677,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	8 Unit	300,000,000	KECAMATAN NGAWI	

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	10,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	4 Unit	250,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	18,976,000	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	7 Unit	200,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	% % %		% % %	100% 100% 100%	100% 100% 100%	421,019,548	165,593,172	165,593,172						100% 100% 100%	338,500,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				65 Laporan	65 Laporan	1,200,000	10,800,000	10,800,000		PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	65 Laporan	8,500,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				264 Laporan	264 Laporan	251,522,548	41,526,172	41,526,172	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	264 Laporan	90,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				108 Laporan	108 Laporan	118,412,000	63,412,000	63,412,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	108 Laporan	165,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	49,855,000	49,855,000	49,855,000		PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	48 Laporan	75,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	%		%	100%	100%	50,779,000	50,779,000	50,779,000						100%	80,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	32,300,000	32,300,000	32,300,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	37 Unit	35,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 21 Unit	0 Unit 21 Unit	18,479,000	18,479,000	18,479,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATA TRANSFER		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Unit 21 Unit	45,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	%		%	100%	100%	105,695,000	58,950,000	58,950,000						100%	328,185,216	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Sesuai Standar	%		%	87%	87%	50,000,000	17,500,000	17,500,000						87%	168,185,216	

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM Desa yang disusun up to date Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Dokumen 0 Laporan 5 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan 5 Laporan	50,000,000	17,500,000	17,500,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	1 Dokumen 0 Laporan 5 Laporan	168,185,216	KECAMATAN NGAWI	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%		%	100%	100%	55,695,000	41,450,000	41,450,000							100%	160,000,000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitasi Bantuan Korban Bencana Jumlah fasilitasi bantuan sosial masyarakat Jumlah fasilitasi dan rekomendasi kesos Jumlah fasilitasi RTLH Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan 48 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 0 Laporan 8 Laporan	10 Laporan 48 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 0 Laporan 8 Laporan	55,695,000	41,450,000	41,450,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	10 Laporan 48 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 0 Laporan 8 Laporan	160,000,000	KECAMATAN NGAWI		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%		%	100%	100%	2,029,206,000	836,415,800	836,415,800							100%	3,889,931,800		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		%	100%	100%	60,810,000	16,510,000	16,510,000								100%	66,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	60,810,000	16,510,000	16,510,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Laporan 4 Laporan	66,000,000	KECAMATAN NGAWI		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan yang disusun tepat waktu	%		%	100%	100%	1,968,396,000	819,905,800	819,905,800								100%	3,823,931,800	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan Pembinaan Masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan				0 Laporan 7 Lembaga 0 Orang	0 Laporan 7 Lembaga 0 Orang	365,996,000	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangten gah	0 Laporan 7 Lembaga 0 Orang	373,931,800	KECAMATAN NGAWI		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Paket	24 Paket	1,252,000,000	0	0	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangten gah	24 Paket	1,200,000,000	KECAMATAN NGAWI		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjut Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16 Kali 16 Laporan 32 Pokmas / Ormas	16 Kali 16 Laporan 32 Pokmas / Ormas	350,400,000	819,905,800	819,905,800	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangten gah	16 Kali 16 Laporan 32 Pokmas / Ormas	2,250,000,000	KECAMATAN NGAWI		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kelurahan yang masuk zona hijau covid	%		%	45%	45%	62,995,000	12,755,000	12,755,000							45%	85,000,000		
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti hasil penyelenggaraan masyarakat kelurahan	%		%	100%	100%	62,995,000	12,755,000	12,755,000								100%	85,000,000	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah makanan yang disediakan Jumlah Obat2 an yang disediakan Jumlah Sembako yang disediakan Jumlah barang yang dicetak				16 Laporan 70 Kotak 100 Botol 1280 Kg 160 Meter	16 Laporan 70 Kotak 100 Botol 1280 Kg 160 Meter	62,995,000	12,755,000	12,755,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	16 Laporan 70 Kotak 100 Botol 1280 Kg 160 Meter	85,000,000	KECAMATAN NGAWI		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100%	100%	297,245,000	219,162,000	219,162,000								100%	215,000,000	

7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDDes Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti Persentase laporan keg pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	% % % % % % % % % %	% % % % % % % % % %	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	297,245,000	219,162,000	219,162,000						100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%	215,000,000	
7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa			0 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	0 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan	80,000,000	43,050,000	43,050,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	48,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah koordinasi dan evaluasi penjarangan perangkat desa Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi penyusunan LPPDes Jumlah sosialisasi administrasi tata pemerintahan desa			0 Dokumen 2 Dokumen 6 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	0 Dokumen 2 Dokumen 6 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	64,965,000	105,515,000	105,515,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Dokumen 2 Dokumen 6 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	56,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	06	2.01	09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah fasilitasi Musdes Jumlah fasilitasi RKPDes dan DURKPDDes Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam			0 Dokumen 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	0 Dokumen 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	80,000,000	59,850,000	59,850,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Dokumen 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	58,000,000	KECAMATAN NGAWI
7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi kegiatan Paskib Jumlah koordinasi Forkompimcam			0 Dokumen 1 Dokumen 15 Laporan 4 Laporan	0 Dokumen 1 Dokumen 15 Laporan 4 Laporan	72,280,000	10,747,000	10,747,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kecamatan Ngawi	0 Dokumen 1 Dokumen 15 Laporan 4 Laporan	53,000,000	KECAMATAN NGAWI



**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA-PD) TAHUN 2023
PADA KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 700.1.2.8/02.89.8/404.200/2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar No.12, Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016

Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id

Ngawi, 18 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2.8/02.89.8/404.200/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) Kabupaten Ngawi Tahun
2023

Yth. Sdr. Camat Ngawi Kabupaten Ngawi
di

NGAWI

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dengan hasil reviu sebagai berikut :

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Mendasar Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.48/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 sudah lengkap;
- b. Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah selaras dengan Perubahan RKPD 2023;

- c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
- e. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- f. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18/404.101.2/B/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

- g. Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.45/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; dan
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.48/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (P-RKPD);
- c. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD).

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan ditetapkan, untuk menguji :

- a. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;

- b. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (P-RKPD);
- c. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD).

V. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 dan dokumen pendukung lainnya serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Langkah kerja dimaksud untuk mendapatkan keyakinan terbatas dengan melakukan pengujian:
 - Apakah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
 - Apakah rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
 - Apakah rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- e. Hasil pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat simpulan hasil Reviu;
- f. Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) berdasarkan simpulan hasil Reviu yang telah dilaksanakan beserta rekomendasinya;
- g. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi 800.1.11.1/02.48/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dengan susunan tim sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Drs. YULIANTO KUSPRASETYO
- Pembantu Penanggungjawab : NUR ARIF RAHMANTO, S.Sos., M.Si
- Pengendali Mutu : JASEMAN, S.STP, M.Si
- Pengendali Teknis : EKO SUNARTO, S,Hut, MM
- Ketua Tim : LILID BINTI TRISNANINGRUM, S.Sos
- Anggota : HARI SISWANTO, ST
CITRA DEYU P, SE, M.Si
INEKE KUSUMADEWI, SE
RIRIN YULI HANDAYANI, S.Sos
ALFI JAUHARO, S.A
- h. Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja dari tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2023.

VI. GAMBARAN UMUM

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.787.964.310,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58.950.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	836.415.800,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.755.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	219.162.000,00
	JUMLAH	7.915.247.110,00

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023

Kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 secara umum telah tercukupi. Dokumen pendukung yang sudah ada:

- a. Hasil Pengendalian pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- b. Perubahan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
- c. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD);
- d. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023;
- e. Berita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah/ laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.

b. Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab dalam Perubahan Renja Dengan Perubahan RKPD

Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatifnya

Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun

2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

e. Koreksi/Perbaikan yang Belum/Tidak disetujui

Tidak ada koreksi.

f. Saran/rekomendasi

Tidak ada rekomendasi.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Ngawi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan.

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,



Drs. YULIANTO KUSPRASETYO

Pembina Utama Muda

NIP. 196607251986021004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ngawi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749016 Fax (0351) 749016 Email : inspektorat@ngawikab.go.id
Website : [http:// www.inspektorat.ngawikab.go.id](http://www.inspektorat.ngawikab.go.id)

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN RENJA-PD)
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023**

Inspektorat Kabupaten Ngawi	Disusun oleh	Lilid Binti Trisnaningrum S.Sos/
	Tanggal/Paraf	18 Agustus 2023
	Diteliti oleh	Eko Sunarto, S.Hut, MM/
	Tanggal/Paraf	18 Agustus 2023
	Disetujui oleh	Jaseman, S.STP, M.Si/
	Tanggal/Paraf	18 Agustus 2023

URAIAN CATATAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.48/404.22/2023 tanggal 14 Agustus 2023 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Berdasarkan Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi Nomor 000.7.2.4/107/404.401/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Reviu Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Inspektur Kabupaten Ngawi, telah disampaikan dokumen terkait Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023, tanggal 21 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
2. Hasil Pengendalian pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
3. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Berita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;
6. SK Tim Penyusun; dan
7. Orientasi dan Agenda Kerja Tim.

Berdasarkan dokumen yang telah diterima, Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 melaksanakan reviu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan langkah kerja reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR).

Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud merupakan kesimpulan dari hasil reviu yang memuat :

- Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang harus diperbaiki;
- Tindakan perbaikan yang disarankan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perbaikan yang telah ditindaklanjuti maupun belum ditindaklanjuti oleh Tim penyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan CHR yang telah disepakati antara Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Ngawi dengan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Reviu.

1. PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah lengkap.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah lengkap

2. Pengujian Atas Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Dalam Perubahan Renja Dengan Perubahan RKPD

Berdasarkan pengujian atas keselarasan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, keselarasan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

3. PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan.

4. PENGUJIAN ATAS PENYELARASAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIFNYA

Berdasarkan pengujian atas keselarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

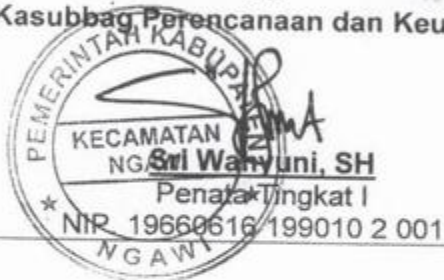
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

5. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

6. Rekomendasi

a.n. Camat Ngawi Kabupaten Ngawi
Sekretaris,
u.b
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



Inspektur Pembantu Wilayah II
sebagai Pengendali Mutu









PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGAWI
TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, 14 Agustus 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Ngawi Tahun 2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SRI WAHYUNI, SH	 ERNA INDRAWATI, SE.
 ENDANG PURWATININGSIH	 GURUH MARDIANTORO, SE., M.Si

LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

: Kecamatan Ngawi
: Ngawi
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 14 Agustus 2023

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang		✓			
	Menjelaskan mengenai :	a	✓			
		b	✓			
		c	✓			
		e	✓			
1.2	Landasan Hukum		✓			
1.3	Maksud dan Tujuan		✓			
1.4	Sistematika Penulisan		✓			
II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN					
	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan	a	✓			
		b	✓			
III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjelaskan mengenai :	a	✓			
		b	✓			
		c	✓			
		d	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		Tarjet Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tabel 3.1 telah disesuaikan dengan pagu Perubahan Renja	✓			
IV PENUTUP						
	Berisikan uraian penutup :					
		a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Renja	✓			
		b Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓			
		c Rencana tindak lanjut				
		d Pada bagian lembar terakhir dicantumkan nama dan disediakan space tempat tanda tangan Kepala Daerah dan cap pemerintah daerah yang bersangkutan (untuk ditanda tanganl Kepala Daerah saat Perbup Renja ditetapkan)	✓			

VERIFIKATOR		TANDA TANGAN
NO	NAMA	
1	ERNA ENDRAWATTI,SE	
2	GURUH MARDIANTORO,SE.,M.Si	







PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGAWI
TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, 14 Agustus 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Ngawi Tahun 2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SRI WAHYUNI, SH	 ERNA INDRAWATI, SE.
 ENDANG PURWATININGSIH	 GURUH MARDIANTORO, SE., M.Si

LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023


NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Ngawi
 KABUPATEN : Ngawi
 PROVINSI : Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 14 Agustus 2023

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :					
		a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Perubahan Renja		✓		
		c Keterkaitan Perubahan Renja dengan Perubahan RKPd	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan R PAPPD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah		✓		alasan pemb ranga v/da sesuai kan - Ranges target & pengeseran paya awy/daerah
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			Bisa lihat smep v/raja
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			Landasan hukum v/da sesuai dari desk.
II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN					
	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan					
		a Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (CETAK DARI APLIKASI SMEP)		✓		di sesuaikan
		b Penjelasan dari hasil evaluasi Pelaksanaan Renja, utamanya kendala yang dihadapi untuk capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang masih rendah	✓			di terangkan / yg tdk ferecapen
III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjelaskan mengenai :					
		a faktor-faktor yang menjadi dasar/pedoman terjadinya perubahan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan	✓			
		b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan	✓			
		c Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Perubahan RKPd	✓			
		d Format Tabel 3.1 (Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan) HASIL CETAK DARI APLIKASI SIPD		✓		format tabel v/da sesuai kan dg format xl (pakan hitreppd)

- format AM hasil diupload .
 - RKPd di ganti Ranga 23
 - kolom di ganti perub ranga
 - kolom H1) disesuaikan 2:

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		Target Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tabel 3.1 telah disesuaikan dengan pagu Perubahan Renja		✓		
IV	PENUTUP					
	Berisikan uraian penutup :					
		a	✓			
		b	✓			
		c				
		d	✓			

VERIFIKATOR		TANDA TANGAN
NO	NAMA	
1	ERNA INDRAMATI,SE	
2	GURUH MARDIANTORO,SE.,M.SI	